



## Politik Identitas Yang Berkelanjutan: Reorientasi Etika Kebangsaan Di Era Krisis Global

Imam Mawardi<sup>1</sup>, Anik Sunariyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Negeri Trunojoyo Bangkalan, Indonesia

E-mail: [imammawardi@unesa.ac.id](mailto:imammawardi@unesa.ac.id) (corresponding Author)

**Abstract.** *Among globalization, social divisions, and the rise of symbolic politics, the dynamics of identity politics in modern democracies reveal increasingly complex symptoms of a crisis in national ethics. Identity politics in Indonesia not only offers recognition and acknowledgment to marginalized groups, but is also often used exclusively and instrumentally, causing polarization, identity conflicts, and rejection of the national values of Pancasila. The purpose of this paper is to examine how sustainable identity politics can be developed through a reorientation of national ethics in an era of global crisis. In this study, a qualitative approach was used, and critical literature review methods were employed to examine a number of academic literature discussing topics such as identity politics, democracy, social ethics, Axel Honneth's theory of recognition, Max Weber's ethics of responsibility, and thought. The analysis process was carried out through steps such as literature classification, critical-conceptual reading, and normative synthesis. The purpose of this analysis is to produce a framework of identity politics based on the principles of recognition, social responsibility, and national solidarity. The study shows that sustainable identity politics cannot be built on symbolic domination, conflict, or the exclusive affirmation of identity. Instead, it requires a foundation of inclusive ethics of recognition and dialogical social responsibility. In this situation, Pancasila is considered not only a national ideology but also a national ethic capable of balancing personal and group interests to maintain Indonesian democracy amid global threats.*

**Keywords/Kata Kunci:** Identity Politics; National Ethics; Pancasila; Recognition; Responsibility; Global Crisis.

### I. Pendahuluan

Di tengah dunia global yang tidak menentu, politik identitas kebangsaan mulai mengalami krisis multidimensional yakni ekonomi, ekologi dan moral yang mulai ditinggalkan sebagai dasar solidaritas sosial manusia. Krisis ini, menimbulkan disorientasi nilai kebangsaan, di mana identitas nasional sering kali digantikan oleh identitas sektarian, agama, ekonomi, etnis. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini tampak menguatnya politik simbolik dan polarisasi sosial di ruang publik, baik dalam ranah politik Elektoral maupun media sosial.

Politik simbolik merupakan jenis komunikasi politik yang bertujuan bukan pada pemahaman rasional terhadap realitas, melainkan pada penciptaan makna yang



berkelanjutan dari realitas melalui pementasan realitas atau visualisasinya. Politik simbolik adalah kegiatan struktur politik bertujuan pada produksi, promosi, paksaan, dan penggunaan metode tertentu dalam menafsikan realitas sosial sebagai yang dominan. Politik simbolik melibatkan penggunaan sumber daya simbolik estetis kekuasaan untuk legitimasi dan konsolidasi melalui penciptaan simbolik pengganti tindakan keputusan politik serta persetujuan oleh masyarakat (Malyukova & Rybakov, 2020).

Demokrasi di Indonesia sendiri pada dasarnya terus tumbuh dalam dinamika dengan persoalan keanekaragaman yang sering kali menjadi pemicu ketidakadilan dalam masyarakat pada polarisasi. Demokrasi di Indonesia sendiri pada dasarnya terus berdinamika dengan persoalan keanekaragaman yang menjadi pemicu ketidakharmonisan antar kelompok. Perbedaan atas dasar keragaman di Indonesia telah banyak mencatatkan sejarah sebagai faktor utama munculnya konflik, seperti konflik antar agama, antar etnis, antar suku. Konflik-konflik tersebut semakin berkembang bukan saja sebagai konflik antar satu identitas melainkan telah memasuki babak baru sebagai konflik antar identitas. Perluasan konflik antar identitas tersebut sering ditemukan sebagai bagian dari proses demokratisasi (Lestari, 2018).

Identitas politik bukan sesuatu yang baru di dunia politik. Namun, kita telah menyaksikan perubahan dan intensifikasi yang signifikan dalam hal ini dalam beberapa dekade terakhir. Dinamika politik identitas telah dipersulit oleh variabel seperti globalisasi, migrasi massal, dan perubahan sosial-ekonomi. Kohesi sosial dan representasi politik yang adil bagi semua kelompok masyarakat muncul sebagai tantangan besar di tengah integrasi global yang semakin erat. Pandangan ini (Fukuyama, 2021) menunjukkan betapa rumitnya politik identitas modern. Sangat penting untuk memahami pengaruh politik identitas dalam demokrasi. Ini tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan di negara berkembang. Perjalanan menuju demokrasi yang inklusif semakin sulit karena perubahan demografi, konflik kelompok, dan perbedaan nilai fundamental (Amika dkk., 2024).

Pendidikan publik, juga dikenal sebagai pendidikan kewarganegaraan, menghadapi tantangan konseptual dan kontekstual dalam proses demokratisasi global yang semakin meningkat sejak abad ke-21. Huntington (1991) menyatakan bahwa sebuah gelombang ketiga demokratisasi sedang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, saat ini. Gelombang ini menimbulkan banyak masalah terkait demokratisasi, termasuk bagaimana perkembangan ekonomi berkorelasi dengan demokratisasi dan jenis pemerintahan tertentu; hubungan ini terkait dengan kebebasan individu, stabilitas politik, dan konsekuensi internasionalnya (Ulfah dkk., 2021).

Negara-negara di seluruh dunia telah mengalami transformasi karena globalisasi, yang juga mengubah struktur dunia internasional. Keahlian menghadapi tantangan yang sangat mendasar, terutama dalam hal spiritualitas dan kebangsaan, yang akan memengaruhi kehidupan sosial, politik, dan nasional. Benteng terakhir adalah kepercayaan nasional yang berlandaskan Negeri Pancasila, dan Negeri Pancasila adalah benteng untuk menghadapi tantangan di era globalisasi yang terus berkembang. Salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini ialah nasionalisme dan patriotisme generasi muda mulai memudar. Ini disebabkan oleh banyaknya pengaruh budaya asing yang masuk ke negara kita. Akibatnya, banyak generasi muda melupakan budaya mereka karena mereka percaya bahwa



budaya asing lebih modern daripada budaya mereka sendiri. Sebagian besar generasi muda mengabaikan nilai-nilai penting bangsa ini (Lisnawati Suargana, 2021).

Pentingnya memahami kembali politik identitas keberlanjutan sebagai sebuah refleksi terhadap reorientasi etika kebangsaan di era krisis global yang masih relevan dalam konteks demokrasi. Perubahan demografis, perbedaan etnis, agama, nilai-nilai yang tumbuh dalam dunia digital serta ketegangan antar kelompok dan kemiskinan masih menjadi masalah bersama dalam ekonomi. Pertentangan nilai-nilai dasar dalam era global semakin sulit menemukan kembali etika kebangsaan yang demokratis. Dalam upaya menjawab permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini akan meninjau literatur terkini yang membahas politik identitas, di satu sisi memberikan ruang bagi ekspresi kultural dan afirmasi terhadap kelompok yang selama ini terpinggirkan. Namun, di sisi lain, politik ini juga melahirkan bentuk baru eksklusivisme, disinformasi dan delegitimasi terhadap nilai-nilai kebangsaan. Hal inilah mendorong perlunya reorientasi etika kebangsaan yakni, pemulihan kesadaran moral tentang hidup bersama yang adil, beradab dan bertanggung jawab secara sosial.

Politik identitas keberlanjutan dalam reorientasi etika kebangsaan di era global sebagai sebuah refleksi historis perjalanan bangsa Indonesia dalam menjaga nilai-nilai kesatuan dengan kejujuran dan identitas kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan lanskap politik identitas yang berkelanjutan tidak dapat dibangun di atas dasar permusuhan atau dominasi simbolik. Sebaliknya perlu fondasi etika pengakuan dan tanggung jawab dapat di maknai melalui nilai-nilai Pancasila. Pancasila bukan sekedar dasar ideologi, tetapi etika kebangsaan. Penelitian utama peneliti yakni bagaimana politik identitas dapat dikembangkan menjadi politik berkelanjutan dan beretika serta teori pengakuan dan etika tanggung jawab dapat menjadi etika moral bagi reorientasi etika kebangsaan di era krisis global yang implikasinya penelitian ini pada keberlanjutan politik identitas dalam menjaga etika kebangsaan.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur sehingga menitikberatkan pada data atau tulisan sebagai bahan yang berhubungan dengan tema yang diangkat. Studi pustaka, juga dikenal sebagai studi buku, adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pemahaman dan analisis teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian, ada empat tahap studi pustaka: menyiapkan peralatan yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengatur waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian. Pengumpulan data ini menggunakan metode mencari sumber dan mengkonstruksikan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian sebelumnya. Agar proposisi dan gagasan dapat didukung, bahan pustaka yang dikumpulkan dari berbagai referensi harus dianalisis secara kritis (Adlini dkk., 2022).

Studi kepustakaan adalah bagian penting dari penelitian, terutama penelitian akademik, di mana tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis dan manfaat praktis. Setiap peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mencapai tiga tujuan utama: mencari dasar teori, membuat kerangka berpikir, membuat hipotesis penelitian, dan membangun landasan teori. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti dapat mengelompokkan, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan berbagai



literatur yang relevan dengan bidang mereka. Dengan melakukan ini, para peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang masalah yang ingin mereka pelajari(Laili dkk., 2023).

Metode ini dimulai dengan mencari referensi dan informasi dari buku, jurnal, dan artikel tentang standar penilaian pendidikan. Setelah itu, penulis membaca secara menyeluruh dan memilih kalimat-kalimat yang relevan dengan tema atau topik penelitian. Selanjutnya, kalimat-kalimat yang relevan dicatat dan digaris bawahi dengan tanda kurung atau tanda lain. Selanjutnya, penulis memeriksa kalimat mana yang akan digunakan dalam penelitian literatur ini dan yang sesuai dengan alur penelitian. Setelah itu, kalimat, paragraf, dan paragraf disusun dengan mempertimbangkan kesesuaian alur penelitian. Penulis kemudian membuat kesimpulan dari penelitian literatur sebelumnya. Pada langkah terakhir, penulis melakukan *review* dengan menelaah kembali penelitian literatur yang telah dilakukan. Ini dilakukan agar temuan penelitian ini mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca(Rahayu dkk., 2021).

### III. Hasil Dan Pembahasan

Menurut penelitian Foucault, politik identitas merupakan karakteristik negara dan masyarakat modern yang liberal dan demokratis, di mana prinsip-prinsip ilmiah diterapkan pada tubuh individu dalam proses politik melalui kekuasaan negara. Tujuannya adalah agar orang "tercerahkan": mencapai tingkat pertumbuhan populasi yang ideal. Hubungan interaktif antar kelompok yang berbeda, terutama kelompok etnis yang berbeda, harus membangun kerangka etis, dalam hal ini sikap toleran, di bawah kerangka ini. Toleransi politik hanya dapat dicapai dalam konteks politik negara yang demokratis. Karena sistem, struktur, dan atmosfer politik yang berlaku sangat memengaruhi toleransi politik. Tingkat kemakmuran ekonomi, struktur dan sistem politik, dan faktor psikologi politik adalah beberapa faktor yang memengaruhi hal ini. Untuk memahaminya, Anda perlu belajar banyak tentang psikologi komunikasi. Konsep politik identitas dapat digunakan untuk memahami bagaimana komunikasi terbentuk dalam hubungan antar manusia (Purbatin & Soenjoto, 2019).

Krisis moral yang sedang berlangsung saat ini telah berkembang menjadi fenomena global yang melanda hampir semua aspek kehidupan manusia. Penguatan prinsip moral yang teguh tidak selalu sejalan dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan arus informasi yang cepat. Akibatnya, banyak degradasi moral individu dan sosial, seperti korupsi, intoleransi, kekerasan, dan ketidakadilan struktural yang merusak tatanan kehidupan bersama. Etika sering kali direduksi menjadi sekadar alat hukum formal tanpa hubungan spiritual dalam masyarakat kontemporer. Hal ini memaksa manusia untuk bersikap materialistis, hedonistik, dan egois, yang pada gilirannya menambah ketidakadilan di seluruh dunia(Amir, Faisal, 2025).

Dalam demokrasi permusyawaratan rakyat, prinsip moral Pancasila mengajarkan betapa pentingnya untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, sila keempat menekankan betapa pentingnya berbicara dan berkolaborasi. Dalam pendidikan kewarganegaraan global, pendekatan yang sama sangat penting digunakan untuk mendorong dialog antarbudaya dan toleransi sebagai cara untuk



membangun pemahaman yang lebih baik tentang cara mengatasi perbedaan dan disorientasi dalam era krisis global yang sering terjadi. Nilai individual tidak sepenting permusyawaratan dan persatuan dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga persatuan Indonesia, yang mendefinisikan rasa "persatuan" dari perspektif Pancasila. Dalam konteks warga negara global, makna filosofis dari "persatuan" dalam sila ketiga Pancasila adalah bahwa keberhasilan dan kesejahteraan seseorang dan masyarakat tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan masyarakat global dan planet bumi secara keseluruhan. Pancasila mengakui bahwa semua orang terhubung satu sama lain di dunia yang semakin terhubung (Irayanti & Komalasari, 2023).

Pancasila menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan dan dibangun dari kearifan lokal dan ajaran universal. Pancasila, sebagai sumber hukum, memberikan pedoman bagi setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari penegakan hukum oleh pemerintah hingga hubungan antar warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, meskipun tidak memiliki konsekuensi hukum langsung, memiliki kekuatan untuk mengikat seluruh warga negara untuk berusaha mencapai visi kehidupan yang berlandaskan Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Filosofi ini mendorong orang untuk menjalani kehidupan mereka berdasarkan nilai-nilainya, yang mencakup etika dan moralitas dalam tindakan (Alviolita dkk., 2024).

Diharapkan upaya ini dapat mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi perubahan yang cepat. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang makna Pancasila melalui pendidikan dan kegiatan sosial, sehingga setiap orang menyadari tanggung jawabnya untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih rukun dan sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, serta memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan modernisasi sambil mempertahankan identitas budaya Indonesia. Pancasila hadir sebagai kompas moral yang mampu membimbing masyarakat Indonesia dalam menghadapi gelombang globalisasi dan Revolusi Industri 4.0. Dalam era di mana informasi dapat mengalir tanpa batas dan budaya asing dapat diakses dengan mudah melalui media elektronik, prinsip-prinsip luhur Pancasila berfungsi sebagai filter natural terhadap ancaman yang dapat merusak identitas bangsa. Misalnya, nilai ketuhanan dan kemanusiaan dapat menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi tidak boleh menghilangkan spiritualitas dan empati manusia. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang menyeimbangkan moralitas dengan modernitas (Atiyatul Maula, Arinah Firdausi, Najwa Salsabila, 2025).

Globalisasi adalah fenomena yang terus berubah dalam kehidupan manusia yang mengubah kebutuhan dan keinginan manusia seiring berjalannya waktu. Sebenarnya, banyak aspek kehidupan orang Indonesia telah diubah oleh globalisasi, dengan efek yang baik maupun buruk dalam bidang sosial, budaya, dan politik. Satu sisi, masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, memanfaatkan peluang globalisasi untuk menjadi lebih terlibat dalam percaturan dunia internasional. Contoh kejadian ini termasuk kehilangan identitas budaya, perubahan nilai-nilai lokal, dan perubahan gaya hidup yang tidak selalu sesuai dengan Pancasila. Identitas kebangsaan Indonesia yang berbasis pada Pancasila harus dipertahankan sambil memenuhi tuntutan perkembangan zaman di era globalisasi saat ini. Pancasila, yang didirikan sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa, harus diperkuat lagi agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Salah satu masalah utama adalah generasi



muda tidak memahami nilai-nilai Pancasila, yang sering dianggap hanya sebagai emblem negara tetapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang salah tentang Pancasila ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara nilai-nilai masyarakat dan struktur pemerintahan, serta konflik sosial (Faturahmat, Icha Rahma Azzahra, Zahid Ikhyia Ulumudin, 2025).

Pancasila memiliki kemampuan untuk menjadi pemandu dalam menghadapi tantangan internasional sambil mempertahankan ciri-ciri nasional. Pancasila dapat berfungsi sebagai penghalang untuk menjaga nilai-nilai budaya Indonesia dalam menghadapi globalisasi yang seringkali merusak budaya lokal. Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga merupakan landasan penting untuk pembangunan ilmu pengetahuan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan damai bagi bangsa ini dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam ilmu pengetahuan (Sianipar, 2024).

Nilai-nilai Pancasila dibutuhkan sebuah pengakuan bagi bangsanya dalam implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam teori pengakuan Honneth bahwa teori pengakuan mengantar pada interaksi subjektif. Subjek tidak hanya membangun interaksi semata, tetapi lebih dari itu, interaksi yang melibatkan tindakan menempatkan Berlin mengurai arti kebebasan. Berdasarkan perspektif Berlin, kebebasan terdiri dari dua konsep: bebas dari (yang dimaksudkan sebagai kebebasan negatif) dan bebas untuk (yang dimaksudkan sebagai kebebasan positif). Berdasarkan kedua konsep ini, Berlin bermaksud untuk memicu perdebatan, diskusi, dan pembentukan ide-ide baru tentang kebebasan. Hanneth melakukan analisis historis tentang arti kebebasan positif dan kebebasan negatif, dan dia juga mengkritiknya. Dalam hal ini nilai-nilai dalam Pancasila dibutuhkan sebuah pengakuan secara sadar di mana memiliki arti Pancasila memberikan ruang kebebasan positif dalam kehidupan bangsanya sehingga perlunya keberlanjutan agar nilai-nilai Pancasila dapat di jadikan pijakan dan perilaku bangsa Indonesia dengan penuh tanggung jawab secara sosial (Rea, 2024).

Max Weber berpendapat bahwa setiap orang dan organisasi memiliki kewajiban sosial terhadap masyarakat. Menurut Weber, siapa pun yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam masyarakat tidak dapat menghindari tanggung jawab sosial. Karena itu, Weber menyatakan bahwa pendidikan harus membantu orang memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi anggota produktif dari masyarakat, sekaligus membantu mereka bertanggung jawab atas dampak sosial dari tindakan mereka. Dia juga mengatakan bahwa pendidikan harus membantu orang memperoleh kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi, serta untuk memahami konsekuensi sosial dari tindakan mereka (Mukhyar, 2025). Penelitian ini mencoba melihat kembali etika kebangsaan yang mulai diorientasi terhadap era krisis global di mana nilai-nilai individu menjadi legitimasi terhadap identitas politik tanpa ada tanggung jawab sosial.



#### IV. Penutup

Politik identitas yang berkelanjutan adalah politik yang berakar pada pengakuan, tanggung jawab, dan solidaritas kebangsaan. Reorientasi etika kebangsaan menjadi kunci dalam menjawab krisis moral dan sosial yang melanda dunia saat ini. Dengan mengintegrasikan teori Honneth, Weber, dan Pancasila, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan politik identitas bergantung pada kesediaan bangsa untuk menumbuhkan etika pengakuan yang reflektif dan tanggung jawab yang dialogis. Inilah fondasi keadaban politik di era krisis global.

#### Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*. 6(1), 974–980.
- Alviolita, D. E., Fitria, N., Syariah, H. E., & Hasyim, U. (2024). *Pancasila Dan Etika Profesi : Penerapan Nilai-Nilai Moral Dalam Kehidupan Meningkatnya Kekerasan , Bentuk Pelanggaran Hukum , Kebohongan Publik , Arogansi Generasi Muda Untuk Memiliki Integritas Dan Kemampuan Dalam Menghadapi Tantangan Tepatnya Sejak Kemerdekaan Republik Indonesia Diproklamasikan Presiden Soekarno Pada 17 Agustus 1945 . Presiden Soekarno Yang Menegaskan Pentingnya Pembangunan Pancasila Pertama Kali Diutarakan Oleh Soekarno Pada Tanggal 1 Juni 1945 Dalam*. 4, 44–55.
- Amika, F. Z., Sukmana, O., Kristano, R., & Susilo, D. (2024). *Dinamika Politik Identitas : Implikasi Terhadap Keberlanjutan Demokrasi Dalam Tinjauan Literatur*. 220–230.
- Amir, Faisal, H. (2025). Rekonstruksi Paradigma Tasawuf Sebagai Fondasi Etika Global Di Era Krisis Moral Modern Pendahuluan Yang Melanda Hampir Seluruh Aspek Kehidupan Manusia . *Kemajuan Lebih. Jurnal Pemikiran Dan Ilmu Keislaman*, 8(1).
- Atiyatul Maula, Arinah Firdausi, Najwa Salsabila, M. S. A. R. (2025). Relevansi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Dan Industri 4.0. *Jurnal Hukum Nusantara*, 1(2), 99–108.
- Faturohmat, Icha Rahma Azzahra, Zahid Ikhyia Ulumudin, K. M. M. (2025). *Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*. 1, 13–22.
- Irayanti, I., & Komalasari, K. (2023). *Membangun Etika Kewarganegaraan Global Melalui Karakter Moral Pancasila : Analisis Konseptual Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan : Volume 13 , Nomor 01 , Mei 2023*. 13(2018).
- Laili, W., Ishaq, M., Anshori, M. I., Jl, A., Telang, R., Utm, K., & Box, P. O. (2023). *Kajian Teori Behavioral Approach Of Leadership : Studi Literatur Review*. 1(3).
- Lestari, Y. S. (2018). Politik Identitas Di Indonesia: Antara Nasionalisme Dan Agama. *Journal Of Politics And Policy*, 1(1), 19–30.
- Lisnawati Suargana, D. A. D. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Wawasan



- Kebangsaan Di Era Globalisasi. *Jurnal Global Citizen*, 2.
- Malyukova, O., & Rybakov, O. (2020). *The Symbolic Subject In The Optics Of Symbolic State Power*. 468(Iccessh), 87–92.
- Mukhyar. (2025). Pendidikan Berbudaya Perspektif Pemikiran Max Weber. *Edusiana: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3, 11–20.
- Purbatin, W., & Soenjoto, P. (2019). Eksploitasi Isu Politik Identitas Terhadap Identitas Politik Pada Generasi Mileneal Indonesia Di Era 4.0. *Journal Of Islamic Studies And Humanities*, 4(2), 187–217.
- Rahayu, Y. N., Barlian, U. C., & Sauri, S. (2021). *Analisis Standar Penilaian Pada Pendidikan Menengah Atas : Studi Literatur Review*. 11(1), 17–33.
- Rea, H. E. (2024). Keadilan Menurut Axel Honneth. *Jurnal Deskostruksi: Jurnal Filsafat*, 10(01), 18–33.
- Sianipar, N. A. (2024). Pancasila Sebagai Paradigma Ilmu: Landasan Filosofis, Etis, Dan Epistemologis. *Journal Of Social, Justice And Policy*, 3(4), 15–18.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Trihastuti, M. (2021). *Urgensi Etika Demokrasi Di Era Global : Membangun Etika Dalam Mengemukakan Pendapat Bagi Masyarakat Akademis Melalui*. 5(2).